

PELAKSANAAN REVOLUSI MENTAL DI INDONESIA: KAJIAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Wildan Nurul Fajar

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Abstract

This study aims to obtain an overview of the mental revolution program in Jokowi-JK Government viewed from the perspective of Civics. This research used qualitative approach which descriptive method of analysis. Collecting data and information in research used study documentation and interview. From the results of research known that the form of mental revolution is more done in the bureaucracy in the form of coaching efforts to the State Civil Apparatus (ASN) in order to serve the community as well as possible. The form of mental revolution in schools in the form of School Introduction activities that contain mental revolution. While in universities in the form of activities of KKN Thematic GNRM. The form of mental revolution in the community is done through the cooperation of 13 components of society with ASN. Citizenship education is a major demand in the Mental Revolution because there is a civic virtue that can shape individual identity through citizenship.

Keywords: *civic educations, mental revolution*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai program revolusi mental pada Pemerintahan Jokowi-JK ditinjau dari perspektif PKn. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang dikemas dalam suatu metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk revolusi mental lebih banyak dilakukan di dalam birokrasi berupa upaya pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bentuk revolusi mental di sekolah berupa kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang bermuatan revolusi mental. Sementara di perguruan tinggi berupa kegiatan KKN Tematik GNRM. Bentuk revolusi mental di masyarakat dilakukan melalui kerjasama komponen masyarakat dengan ASN. Pendidikan kewarganegaraan merupakan tuntutan besar dalam menjalankan Revolusi Mental karena di dalamnya terdapat *civic virtue* yang dapat membentuk identitas individu melalui kewarganegaraan.

Kata kunci: pendidikan kewarganegaraan, revolusi mental

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia perlu melakukan revolusi mental karena *nation building* tidak mungkin maju jika hanya mengandalkan perombakan institusional. Perombakan perlu juga menyentuh manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. Sudah saatnya bangsa Indonesia melakukan tindakan korektif dengan mencanangkan revolusi mental yang dapat menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan *nation building* baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan (Joko Widodo dalam Sinamo-ed, 2014:5).

Dalam rangka merealisasikan program tersebut, Pemerintahan Joko Widodo memasukan program ini dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan menjadikan program revolusi mental sebagai salah satu prioritas utama pembangunan pada Pemerintahan Jokowi-JK. Wahana utama yang dapat digunakan dalam pelaksanaan revolusi mental adalah dunia pendidikan. Dalam hal ini perlu ada reorientasi dalam dunia pendidikan dengan menempatkan proses kebudayaan (olahpikir, olahraga, olahkarsa, dan olahraga) di jantung kurikulum (Yudi Latif dalam Sinamo-ed, 2014:23). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang oleh Joko Widodo disebut sebagai salah satu bagian dari program revolusi mental, memiliki tuntutan yang besar dalam pembangunan manusia yang cerdas dan berkepribadian menuju masyarakat berkepribadian.

Selain dalam bidang pendidikan, sasaran revolusi mental pun dapat mengarah pada pembangunan mental masyarakat. Maka tepat kiranya jika revolusi mental pun diterapkan secara langsung kepada masyarakat melalui program-program efektif yang menuju pada pembangunan mental masyarakat. Tak kalah pentingnya adalah menggalakan program revolusi mental dalam birokrasi pemerintahan agar terjadi perubahan budaya kerja, cara berfikir dan cara pandang aparat pemerintah dalam upaya pelayanan kepada masyarakat. Negara Indonesia memerlukan birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar dapat bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah.

Melihat lingkup sasaran revolusi mental yang sangat terkait sekali dengan domain PKn, maka dari itu perlu kiranya melakukan pengkajian terhadap revolusi

mental dari sudut pandang PKn. Karena pada dasarnya PKn itu sebagai suatu sistem pengetahuan, maka PKn memiliki visi akademis dan pedagogis yang memiliki empat dimensi yakni: pertama, program kurikuler kewarganegaraan dikenal sebagai *school civic education* (SCE); kedua, sebagai program sosial-kultural kewarganegaraan yang secara akademis dikenal sebagai *community civic education* (CCE); ketiga, sebagai program dalam domain birokrasi yang dikenal *cived for government*; dan keempat, sebagai kajian ilmiah kewarganegaraan yang di dalamnya tercakup *civic research and development* (CRD) (Winataputra, 2001; Sapriya, 2007). Dari keempat dimensi tersebut, PKn dapat mengkaji bagaimana program revolusi mental dilaksanakan di sekolah melalui mata pelajaran PKn, di masyarakat, dan dalam birokrasi pemerintah.

Sesuai dengan hakikat masalah diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “bagaimana Program Revolusi mental dalam Pemerintahan Jokowi-JK ditinjau dari perspektif PKn. Rumusan masalah tersebut selanjutnya diuraikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Revolusi Mental dalam pemerintahan Jokowi-JK?
2. Apa saja bentuk-bentuk revolusi mental yang dilaksanakan baik di sekolah, masyarakat maupun dalam birokrasi?
3. Bagaimana pandangan PKn terhadap revolusi mental yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi-JK?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai program revolusi mental yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi-JK ditinjau dari perspektif PKn.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik objek telaaahnya, pada dasarnya penelitian ini menerapkan metode deskriptif analisis yang bermaksud untuk menggali, mengkaji, memilih, dan mengorganisasikan berbagai pemikiran dan praksis yang telah terdokumentasikan. Sementara pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berimplikasi pada

penggunaan ukuran-ukuran kualitatif secara konsisten. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi studi dokumentasi dan wawancara. Penelitian dilaksanakan pada Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Dalam penelitian ini analisis data mengacu pada langkah-langkah yang dipakai oleh Miles dan Huberman (2007:16-19) yang terdiri atas tiga alur kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Konsep Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)

Dalam konteks Indonesia, istilah Revolusi Mental pertama kali dicetuskan Presiden RI pertama Soekarno dalam pidato kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1957. Revolusi Mental ala Soekarno adalah semacam Gerakan Hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia Baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat Elang Rajawali dan berjiwa Api.

Gagasan Revolusi Mental ini kemudian pada tahun 2014 digaungkan kembali oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Secara resmi Gerakan Revolusi Mental sudah menjadi bagian dari program Pemerintah dengan dimasukkan program tersebut dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertugas untuk menjadi Koordinator dalam seluruh gerakan Revolusi mental.

Revolusi Mental adalah gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap-sikap, nilai-nilai dan perilaku bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Revolusi

Mental merupakan gerakan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan memperkuat peran nyata penyelenggara negara dan seluruh elemen masyarakat. Secara nasional unsur pelaksana gerakan ini setidaknya terdiri atas 4(empat) pelaku utama yaitu Penyelenggara Negara (eksekutif,legislatif, yudikatif) baik pusat maupun daerah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat.

Tujuan dilaksanakannya program revolusi mental oleh Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala sebagaimana yang dijelaskan dalam Modul Pelatihan Fasilitator Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental (2016), yaitu:

- a. Mengubah cara pandang, pola pikir, perilaku dan cara kerja, yang berorientasi kepada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
- b. Membangkitkan kesadaran serta membangun optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan pondasi tiga pilar trisakti.
- c. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul.

Revolusi mental memiliki tiga nilai utama, yakni *pertama*, integritas yang di dalamnya meliputi sikap jujur, dapat dipercaya, berkarakter, bertanggung jawab dan konsisten. *Kedua*, etos kerja yaitu sebagai sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis, dan selalu mencari cara-cara yang produktif dan inovatif. Dan *ketiga*,gotong royong yang terkandung di dalamnya yaitu kerjasama, solidaritas, tolong menolong, peka, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan.

2. Bentuk-Bentuk Revolusi Mental

Gerakan revolusi mental Pemerintahan Jokowi dilaksanakan baik di lingkup sekolah, masyarakat maupun dalam birokrasi.

Bentuk revolusi mental di sekolah adalah program yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk mengenalkan GNRM pada Peserta Didik Baru. Jika dahulu ada istilah MOS yang berisi kegiatan perpeloncoan, sekarang muatan-muatan dari MOS itu berisi muatan revolusi mental yang dikemas dalam kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah. Revolusi mental yang di dalamnya berisi integritas, etos kerja dan gotong royong, nilainya itu ditanamkan kepada peserta didik baru di tiap sekolah. Kegiatan MOS yang dimaksud, sekarang bernama Pengenalan Lingkungan Sekolah yang di dalamnya terdapat muatan revolusi mental. Pada level perguruan tinggi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bekerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan kemahasiswaan, Kementerian riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bersama 34 Perguruan Tinggi dan perwakilan setiap Provinsi melakukan kerjasama melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa dengan tematik Revolusi Mental(KKNRM). Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah bentuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Program KKN-RM berbasis pada 3 nilai-nilai yakni Integritas, etos kerja dan gotong royong, dengan implementasi3 nilai melalui sikap/perilaku melayani, bersih dan tertib kepada masyarakat di kota maupun di desa agar terbangun berkarakter mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. Melalui program ini gerakan aksi revolusi mental melalui partisipatif masyarakat akan lebih luas dan masif.

Bentuk pelaksanaan Revolusi Mental di Masyarakat dilaksanakan melalui program Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia bersatu. Program Gerakan Indonesia Bersih terkait dengan cara merubah masyarakat Indonesia dalam aspek kebersihan lingkungan. Dengan gerakan ini diharapkan dapat menjadikan bersih sebagai sebuah budaya serta mengubah perilaku dan mental masyarakat terhadap kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, mulai memilah

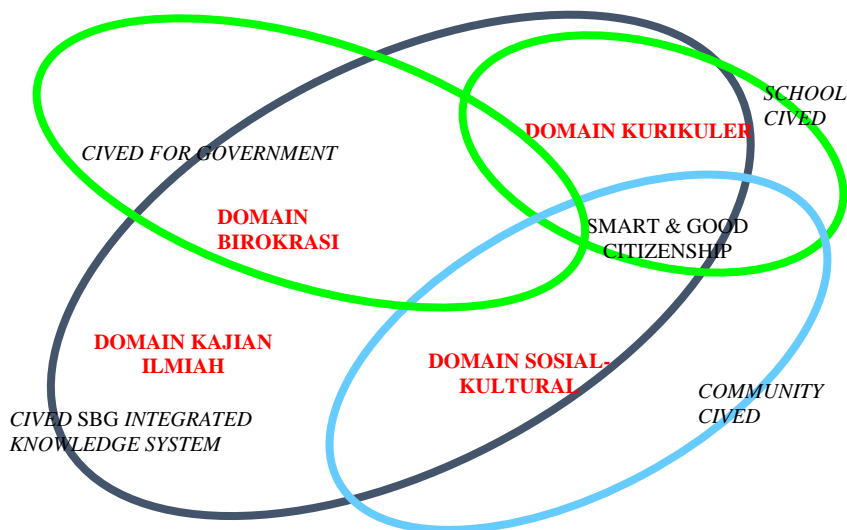
sampah rumah tangga organik dan anorganik, serta birokrat dapat menangani permasalahan kebersihan tersebut dengan kesungguhan hati. Gerakan Indonesia Tertib, yaitu salah satu gerakan dalam program GNRM untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih tertib khususnya tertib dalam menggunakan ruang publik, tertib dalam berlalu lintas, dan tertib pada saat antrai. Tujuan Gerakan Indonesia Tertib adalah untuk dapat membangun kesadaran dan menciptakan budaya tertib di masyarakat. Selain itu tujuan lainnya yaitu dapat memberdayakan agen perubahan dalam menjalankan Gerakan Indonesia Tertib di masyarakat. Agen perubahan merupakan aktor-aktor yang telah ditunjuk untuk menjadi pelopor perubahan menuju Indonesia tertib. Gerakan Indonesia Mandiri yaitu gerakan masyarakat dan para penyelenggara negara untuk mewujudkan perilaku kreatif, inovatif, serta beretos kerja tinggi untuk mewujudkan kemandirian di bidang pangan, energi dan teknologi dalam menghadapi persaingan regional dan global. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia; mendukung, mendorong, serta meningkatkan kewirausahaan dan ekonomi kreatif; dan meningkatkan apresiasi dalam seni, inovasi, dan kreativitas. Gerakan Indonesia Bersatu yaitu adalah gerakan masyarakat dan para penyelenggara negara untuk mewujudkan perilaku saling menghargai dan gotong royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa berdasarkan 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Tujuan Gerakan Indonesia Bersatu yaitu meningkatkan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi di masyarakat; meningkatkan kehidupan yang harmonis di masyarakat tanpa ada diskriminasi terhadap kaum minoritas dan marjinal; meningkatkan inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan Indonesia; dan meningkatkan kesadaran nasionalisme dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Pada tataran birokrasi, program revolusi mental dilakukan melalui gerakan Indonesia melayani yang berada di bawah koridor Kementerian PAN-RB. Gerakan Indonesia melayani dijadikan prioritas karena banyaknya keluhan

masyarakat terkait pelayanan publik. Gerakan Indonesia Melayani adalah gerakan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik aparatus sipil negara yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Gerakan Indonesia Melayani berupaya untuk mengubah pola pikir/paradigma penyelenggaraan pelayanan publik dari semula berorientasi pada “pemerintah sebagai penyedia” menjadi pelayanan yang berorientasi pada “kebutuhan masyarakat sebagai pengguna” Gerakan Indonesia Melayani merupakan gerakan yang berangkat dari permasalahan masyarakat Indonesia dalam aspek pelayanan publik. Pelayanan publik di Indonesia dipandang belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat menuntut agar mutu pelayanan yang disediakan pemerintah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya Gerakan Indonesia Melayani diharapkan terdapat peningkatan pelayanan publik pada setiap instansi. Gerakan Indonesia Melayani juga berupaya untuk mengendalikan dan mencegah timbulnya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi dalam hal ini penyelenggara Negara memiliki peran strategis dalam implementasi program Revolusi mental.

3. Revolusi Mental dalam Tinjauan PKn

Kajian mengenai revolusi mental yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kallabaik di sekolah, masyarakat maupun dalam birokrasi. Jika kita lihat dalam lingkup kultur akademis dan pedagogis PKn maka kajian ini berada pada, *pertama* sebagai program kurikuler kewarganegaraan yang dikenal sebagai *school civic education (SCE)*; *kedua*, sebagai program sosial-kultural kewarganegaraan yang secara akademis dikenal sebagai *community civic education (CCE)*; dan *ketiga*, sebagai program dalam domain birokrasi yang dikenal *cived for government*. Ketiga domain tersebut memiliki keterikatan yang erat satu sama lain sebagaimana dapat terlihat dari gambar berikut:



Sumber: Winataputra : 2001; Sapriya: 2007

Istilah PKn yang digunakan adalah PKn dalam arti *citizenship education* yaitu sebagai istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan media dalam ranah pendidikan kemasyarakatan dan sebagai kerangka konseptual dan sistematis terkait dengan berbagai upaya pengembangan dan penguatan keilmuan pendidikan kewarganegaraan (Cogan, 1999:4).

Kajian ini merupakan bagian dari instrumentasi dan praksis PKn dalam status ke 5 yaitu sebagai kerangka konseptual dan sistematis dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait dengan berbagai langkah dalam pengembangan keilmuan PKn sebagai bidang kajian ilmiah yang melandasi dan sekaligus menaungi PKn (Winataputra, 2012:73).

Pengkajian terhadap program revolusi mental sesuai dengan misi akademis PKn yaitu mengembangkan struktur atau batang tubuh keilmuan pendidikan kewarganegaraan termasuk di dalamnya konsep, prinsip dan generalisasi melalui

kegiatan penelitian dan pengembangan (fungsi epistemologi) dan memfasilitasi praksis sosio-pedagogis dan sosio-kultural dengan hasil penelitian dan pengembangannya itu (fungsi aksiologis). Perwujudan misi tersebut akan memfasilitasi pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai *proto science* menjadi disiplin baru dan dalam waktu bersamaan secara sinergistik akan dapat meningkatkan kualitas isi dan proses pendidikan kewarganegaraan. Dengan begitu PKn akan memiliki sumbangan penting tentang pemaknaan upaya membentuk warga negara yang baik (Syamsuri, 2010).

SIMPULAN

Merujuk pada hasil dan pembahasan yang telah diuraikan terdahulu, maka dapat dirumuskan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut:

1. GNRM merupakan program kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla yang dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019. Program Revolusi Mental itu meliputi 5 gerakan, yaitu gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia mandiri, dan Indonesia bersatu.
2. Bentuk revolusi mental lebih banyak dilakukan di dalam birokrasi berupa upaya pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Program revolusi mental yang dilaksanakan dalam lingkup birokrasi adalah Gerakan Indonesia melayani. Bentuk revolusi mental disekolah berupa kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah yang bermuatan revolusi mental. Sementara di perguruan tinggi berupa kegiatan KKN Tematik GNRM. Bentuk revolusi mental di masyarakat dilakukan melalui program Gerakan Indonesia tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu.
3. Revolusi mental merupakan suatu proses pendidikan pembentukan dan pengembangan karakter yang tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional yang

berlaku. Dalam kaitannya dengan lingkup kultur akademis dan pedagogis PKn, kajian revolusi mental berada pada domain kurikuler, domain sosiokultural dan domain birokrasi yang satu sama lain saling memiliki keterkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cogan.J.J. (1999).*Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CICED.
- Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.2016. Modul Pelatihan Fasilitator Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental. Jakarta _____ . 2016. Panduan dan Petunjuk Teknis KKN Revolusi Mental. Jakarta _____ . 2016. Seri 2 Buku Saku Gerakan Nasional Revolusi Mental. Jakarta
- Miles, M.B. & Huberman, A. M 2007, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dari judul *Qualitative Data Analysis*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Samsuri (2010).*Transforming Islamic Value into Civic education*. Jurnal Millah Vol IX No. 2
- Sapriya 2007, *Perspektif Pemikiran Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa (Sebuah Kajian Konseptual-Filosofis PKn dalam Konteks Pendidikan IPS)*, Disertasi SPs UPI, tidak diterbitkan.
- Sinamo, J, 2014, *Revolusi Mental: Dalam Institusi, Birokrasi, dan Korporasi*, Institute Darma Mahardika, Jakarta.
- Winataputra, U.S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual Dalam Konteks Pendidikan IPS*. Disertasi PPS UPI: tidak diterbitkan.
- Winataputra, US & Budimansyah, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional: Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran*, Widya Aksara Press, Bandung.

Dokumen-Dokumen:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- Buku I Agenda Pembangunan Nasional: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019